

GERILYA DI LADANG MINYAK SEBAGAI PERLAWANAN RAKYAT AHVAZ TERHADAP DISKRIMINASI SOSIAL PEMERINTAH IRAN DI PROVINSI KHUZESTAN (1925-2017)

Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Abstrak: Selama integrasi nasional, pemerintah mendiskriminasi orang-orang Ahvaz yang berbudaya Arab dengan mengasimilasi budaya Persia (Persianisasi) ke dalam sistem sosial masyarakat Iran. Namun, karena akumulasi historis yang dilakukan pemerintah Iran kepada orang-orang Ahvaz, mereka mulai menahan gerilyawan di ladang minyak sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Perlawanan orang-orang Ahvaz membuat pemerintah Iran lebih represif terhadap pemberontakan, karena di Khuzestan memiliki cadangan minyak besar dan pintu perdagangan ke Teluk Persia dan Irak membahayakan geopolitik Iran di Teluk Persia.

Kata Kunci: Orang-orang Ahvaz, Pemerintah Iran, Gerilya di Lapangan Minyak, Provinsi Khuzestan.

Abstract: During national integration, the government discriminated against the Ahvaz people who were Arabically cultured by assimilating the Persian culture (Persianization) into the social system of Iranian society. However, due to the historical accumulation which the Iranian government did to the people of Ahvaz, they began to hold guerrillas in the oil field as a resistance to injustice. The Ahvaz people's resistance made the Iranian government more repressive against the insurgency, because in Khuzestan had huge oil reserves and trade doors to the Persian Gulf and Iraq endangered Iranian geopolitics in the Persian Gulf.

Keywords: People of Ahvaz, Government of Iran, Guerrilla in Oil Field, Khuzestan Province.

PENDAHULUAN

Setiap *nation-state* yang ada di dunia memiliki peristiwa sejarah yang membentuk karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Akumulasi historis di masa lampau negara-bangsa (*nationstate*) memengaruhi masa depannya mengatur sistem sosial-budaya yang multietnis. Apa-bila negara-bangsa (*nation-state*) tidak mapu mengatasi “riak” dari akumulasi historis di masa lampau, maka jangankan mengejar ketertinggalan dengan negara lain, menjaga keutuhan negara pun tidak bisa.

Negara-bangsa yang dibentuk atas multietnis dan multiagama merupakan sarana relasi sosial dalam menjaga persatuan tanah air. Keberagaman di dalam sistem sosial suatu negara-bangsa semestinya menjadi keniscayaan bersatu menghilangkan ikatan-ikatan primordialisme dan etnosentrisme apalagi membentuk diskriminasi sosial secara terstruktur. Tentu tidak mudah bagi negara-bangsa “melu-nakkan” kelompok-kelompok sosial yang beranekaragam sebagai sebuah identitas nasional yang terintegrasi.

Percikan konflik antar kelompok masyarakat dapat diminimalisir dengan mengatur keanekaragaman masyarakat ke dalam kebijakan berkeadilan dan berperikemanusiaan agar terhindar dari disintegrasi nasional (Grosby, 2011:53-54). Namun, pada kasus Iran yang terdiri dari berbagai macam etnis dan agama, timbul masalah dari kebijakan akan pengaturan sosial penduduk mayoritas dengan minoritas. Penduduk Iran tahun 2017 berjumlah 80.956.243 jiwa dengan mayoritas penduduk berbangsa Persia (World Population Review, 2017). Berdasarkan etnisitas, negara Iran terdiri atas Persia (Farsi/Parsi) 51%, Azeri 24%, Gilaki dan Mazandarani 8%, Kurdi 7%, Arabistan (Arab) 3%, Baluchi (Baluch/Baluchist) 2%, Lor dan etnis lain sebesar 1% (Abud, 2014:1).

Berdasarkan data tersebut, etnis Persia sebagai *major society* malah “mengamini” kebijakan pemerintah untuk mendiskriminasi etnis minoritas, yang ternyata hukum negara Iran mendukung Persianisasi. Realitas ini sungguh mencengangkan bagi Negara di luar Iran, sebab sangat jarang pemberitaan tentang pergolakan di Iran. Diskriminasi sosial ditujukan sebagai legitimasi yang sah kepada masyarakat berbudaya Persia dan beragama Syiah untuk menjalankan roda pemerintahan dan geopolitik negara Iran di Teluk Persia (Abud, 2014:3).

Terdapat ketimpangan pada kelas-kelas sosial antar masyarakat di dalam sistem sosial-budaya masyarakat Iran, di mana hanya penduduk beretnis Persia saja yang boleh menentukan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan. Dengan begitu, masyarakat beretnis Persia selaku etnis mayoritas memperoleh legitimasi sosiopolitik yang kuat untuk melakukan “penyingkiran” kepada etnis minoritas non Persia yang mengancam posisi mereka di puncak kelas. Tujuannya agar dapat mengontrol kehidupan penduduk beretnis minoritas non Persia melalui kebijakan negara sekaligus menjamin stabilitas

geopolitik negara dari pemberontakan. Pemerintah Iran menggunakan diskriminasi sosial kepada rakyat Ahvaz untuk membanggakan masyarakat beretnis Persia sebagai *trah* peradaban agung Persia, tidak lain untuk mensuperioritaskan identitas ke-Persia-annya.

Akibat diskriminasi sosial ini, rakyat Ahvaz tersegregasi dari sistem sosial masyarakat Iran mengelompok berdasarkan etnis dan agama yang sama. Peristiwa yang sama juga terjadi dengan etnis minoritas lain. Mereka tidak bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat beretnis Persia maupun masyarakat etnis minoritas lainnya dalam menumbuhkan kesadaran negara Iran milik bersama!. Dahulu rakyat Ahvaz di Provinsi Khuzestan kemudian menjadi daerah otonom atas perjanjian antara Turki Ottoman dengan Kerajaan Safawi untuk membentuk pemerintahan dan identitas berbudaya Arab abad 14-17 (Hamid, 2015).

Namun menjelang runtuhnya Turki Ottoman, pada abad ke-19 terjadi perjanjian politik antara Turki Ottoman dengan Inggris yang menguasai Irak-Iran menyebabkan wilayah Khuzestan diintegrasikan ke dalam wilayah Iran (Abud, 2014: 28). Semenjak terintegrasi ke dalam wilayah Iran, Khuzestan diberi hak eksplorasi dan eksploitasi oleh Inggris. Sejak saat itu juga, Ahvaz dibangun kilang minyak dan gas yang cukup bagi pemerintah Inggris dan Iran.

Setelah menjadi wilayah Iran, rakyat Ahvaz mulai mengalami proses perubahan dan dehumanisasi terhadap kelompoknya di dalam sistem sosial yang baru akibat perjanjian Inggris yang ingin mendirikan Anglo-Iranian di kawasan Asia Barat Daya. Mereka menjadi tidak otonom di bawah pemerintah Iran untuk tidak ada satu pun negara asing (baik Inggris, Rusia, maupun Jerman) yang mendukung kembalinya pemerintahan Ahvaz seperti sebelum integrasi nasional (Khazaal, 2008: 128). Tentunya pelarangan tersebut bertujuan melindungi

kepentingan geopolitik Iran, Inggris, dan Rusia menghadapi Perang Dunia I dan II terutama menjamin eksistensi akses perdagangan dan minyak dari dan ke Khuzestan di Teluk Persia. Hasil dari kilang minyak Khuzestan memperoleh pendapatan 216 juta lira yang di bagi ke *Anglo-Iranian Oil Company* (AI-OC) dan pemerintah Iran, lantas tidak membuat rakyat Ahvaz sejahtera (Zayar, 2002:20).

Kondisi ini terus berlangsung dari masa ke masa, sehingga rakyat Ahvaz kehilangan identitas (*identity loss*) selaku etnis Arabistan. Rakyat Ahvaz di dalam kehidupan kelompoknya menggunakan budaya Arab untuk berinteraksi antar sesama, membaca Al-Quran, menguman-dangkan adzan, pemberian nama sese-orang atau jalan, menutup aurat (menggunakan cadar dan gamis), pembelajaran di kelas, dan lain-lain. Rakyat Ahvaz ha-rus dipersianisasikan sebagai bentuk dari pemerintah Iran membumikan dan melestarikan kebudayaan Persia ke warga negaranya. Sungguh menderita secara psikis rakyat Ahvaz tidak bisa menampilkan identitas ke-Arab-annya di tengah masyarakat Iran. Padahal pemerintah selalu menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan berpendapat kepada seluruh warga negaranya yang dijamin di dalam hukum negara Syiah di bawah sistem *Mullah* (ulama) (Ahvaz Human Rights Organization, 2007).

Tekanan psikis yang diterima rakyat Ahvaz memicu percikan untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Iran yang selama 92 tahun menganaktirikan mereka dibandingkan dengan masyarakat Persia yang berada pada kelas sosial pertama. Pada akhirnya, mereka memilih bergerilya di ladang minyak di Provinsi Khuzestan menghancurkan dan merebut kilang-kilang minyak yang ada di provinsi tersebut agar pemerintah menghapus segala manifestasi diskriminasi sosial kepada rakyat Ahvaz. Gerilya di ladang minyak ini justru menjadi arena pertempuran *Iran Army Force (IAF)* dengan pasukan pemberontak Ahvaz, kedua kubu sama-sama

melindungi kepentingan masing-masing, sehingga sulit menemukan titik perundingan saat mediasi konflik. Korban jiwa berjatuhan se-mentara kerugian harta benda tidak bisa ditaksir mengingat gerilya di ladang minyak (*oil field*) ini dilakukan rakyat Ahvaz sengaja ditutup-tutupi pemerintah Iran.

Dalam tulisan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara komprehensif-historis dari sudut pandang emik rakyat Ahvaz atas perlakuan pemerintah Iran selama ini kepada minoritas. Narasi yang dibentuk pemerintah Iran kepada dunia internasional menggambarkan pihak rakyat Ahvaz sebagai obyek terjadinya pemberontakan dalam negeri yang menciptakan instabilitas dan diberi label (*labeling*) “teroris”. Tujuannya agar dunia inter-nasional tidak berempati pada perjuangan rakyat Ahvaz menghilangkan diskriminasi sosial yang selama 92 tahun merusak psikis dan semangat menampilkan identitas budaya etnis Arab. Membantu perjuangan mereka sama saja menyatakan perang kepada pemerintah Iran yang memiliki persenjataan nuklir di kawasan Asia Barat Daya setelah Israel.

Tulisan pada penelitian ini memberikan analisis-historis kontekstual untuk lebih “demokrasi sosial” memberi kesempatan memperbaiki nasib dan membangun negeri kepada etnis minoritas (penduduk) non Persia. Tulisan ini memuat pembahasan tentang gambaran umum Provinsi Khuzestan, latar belakang perlawanan rakyat Ahvaz terhadap pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan, dan gerilya di ladang minyak sebagai sebuah perlawanan terhadap pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan metode sejarah. Adapun prosedur dalam penelitian ilmu sejarah adalah sebagai berikut: menentukan permasalahan, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan terakhir

historiografi (*historical writing*). Prosedur tersebut merupakan bagian yang harus dilewati sejarawan maupun ilmuwan sosial-budaya yang menggunakan metode sejarah untuk menganalisis secara kritis peristiwa masa lampau dalam mesintesis fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber menjadi sebuah narasi yang apik (Daliman, 2012:28).

Prosedur pertama adalah menentukan permasalahan. Menentukan permasalahan lebih baik dan utama dari metode sejarah, karena peneliti dapat memfokuskan pokok permasalahan sebagai fokus penelitian dan perhatian peneliti terhadap masalah. Maka dari itu, permasalahan di dalam tulisan ini adalah bagaimana gerilya yang dilakukan rakyat Ahvaz di ladang minyak di Provinsi Khuzestan terhadap pemerintah Iran dalam upaya menghilangkan diskriminasi sosial. Selama Ahvaz masuk ke dalam wilayah Iran pasca perjanjian Inggris-Iran, pemerintah Iran selalu mesegregasi dan mengasimilasi (paksa) ke dalam penduduk berbudaya Persia melalui Persianisasi segala lini kehidupan (politik, budaya, sosial, pendidikan, militer, dan ekonomi). Tentunya akumulasi historis Ahvaz di masa lampau ini memunculkan riak perlawanan dalam bentuk front perjuangan (*Ahvaz Democratic Popular Front/ADPF*) dan partai politik (*Democratic Solidarity Party of Al-Ahvaz*) kepada sistem sosial masyarakat Iran yang terstratifikasi oleh pemerintah Iran secara masif dan terstruktur.

Prosedur kedua adalah heuristik, pada prosedur ini peneliti menemukan sumber primer dan sekunder mengenai perlawanan rakyat Ahvaz terhadap pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan. Sumber primer terdiri dari dokumen resmi pemerintah Iran, surat-surat Ali Abthahi (*Sayed Mohammed Ali Abthahi Letter 1998 M*), deklarasi Al-Muhammerah, *Letter of Intention to Change Ethnic Composition of Arabistan (Ahvaz) from Iran's Armed Forces (IAF)*. Sumber primer di dalam tulisan ini bukan sebagai sumber primer pertama melainkan sumber primer dari tangan

kedua dan ketiga (Faisal Khazaal dan *Ahvaz Human Rights Organization*). Selain dari dokumen, sumber primer juga berasal dari laman situs (*website*) milik pergerakan bawah tanah rakyat Ahvaz: *Ahvaz Democratic Popular Front (ADPF)* www.alah-waz.org, *Democratic Solidarity Party of Al-Ahvaz (DSPA)* www.alah-waz.info, *The Arab Struggle Movement for Liberations of Al-Ahvaz (ASMLA)* www.ahwazna.net yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris maupun dari CIA.

Sementara sumber sekundernya berkaitan tentang Iran, sistem sosial-budaya masyarakat Iran, dan konsep politik gerilya terdiri dari buku, jurnal, *e-journal*, artikel, dll. Pada prosedur ketiga yakni verifikasi (kritik). Pada prosedur ini peneliti melakukan kritik internal dan kritik eksternal terhadap sumber-sumber yang diperoleh. Tujuan dari verifikasi adalah mencari kebenaran mengapa rakyat Ahvaz mengadakan perlawanan dalam bentuk gerilya di ladang minyak. Kritik pertama adalah kritik internal berisi mengenai kritik akan substansi kertas dan tanggal pencatuman dokumen sezaman dengan temporal penelitian. Selanjutnya adalah kritik eksternal berupa warna kertas, asal-usul dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Iran, individu atau dari pemberontak Ahvaz, dan keaslian dokumen yang disalin dari pihak kedua dan ketiga (Faisal Khazaal dan *Ahvaz Human Rights Organization*).

Pada prosedur keempat yakni interpretasi, peneliti berusaha memahami kontekstual historis pada aspek sosio-kultural dan ekonomi-politik dari rakyat Ahvaz selaku objek yang tertindas. Mereka mengangkat senjata kepada pemerintah atas diskriminasi sosial, yang menyebabkan mereka tersegregasi di dalam sistem sosial masyarakat Iran. Pada tahapan ini peneliti menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial (politik-militer) yakni perang gerilya pada perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ahvaz di ladang minyak. Tentunya secara umum

gerilya dipahami sebagai kegiatan militer yang dilakukan di hutan-hutan berbeda dengan gerilya rakyat Ahvaz yang dilakukan di ladang minyak yang berada di gurun pasir. Menurut S. Kalyanaraman (2003) konsep gerilya mengalami perkembangan mulai dari masa Romawi Kuno hingga abad ke-21 dengan beberapa perubahan tempat seperti di gurun, hutan, perkotaan, pedesaan, atau-pun di ladang minyak maupun perubahan bentuk misalnya *jihad* di Afghanistan dan Pakistan serta *urban guerrilla* di negara-negara Amerika Latin. Gerilya dipahami sebagai sebuah bentuk peperangan dimana pihak yang secara strategis lemah menganggap serangan taktis dalam bentuk, waktu, dan tempat yang dipilih. Gerilya dilakukan oleh sekelompok kecil orang-orang yang berperang melawan “tentara penjajah” yang superior atau untuk melemahkan pertahanan terakhir atas wilayah yang ditaklukkan; oleh pihak yang lebih lemah, atau

sebagai sarana pelengkap dalam perang konvensional; dan pada tahap awal perang revolusioner yang bertujuan menggulingkan otoritas politik yang sah (Kalyanaraman, 2003:172).

Ruang spasial pada tulisan ini yaitu Provinsi Khuzestan yang merupakan wilayah etnis Ahvaz berbudaya Arab dan beragama Islam Sunni di Iran. Sementara itu ruang temporalnya peneliti batasi dari tahun 1925-2017 sebagai waktu terjadinya gerilya rakyat Ahvaz terhadap diskriminasi sosial oleh pemerintah Iran. Fokus penelitiannya yaitu perlawanan rakyat Ah-vaz dalam bentuk gerilya di ladang minyak di Provinsi Khuzestan. Penelitian ini merupakan kajian/studi Hubungan Inter-nasional, Sejarah Militer, Sejarah Politik, dan Sejarah Asia Barat Daya. Di dalam penelitian ini menggunakan model sejarah strukturalis.

Berada terutama di barat daya Iran, orang-orang Ahvaz Arab adalah salah satu kelompok etnis di Timur Tengah yang paling tidak beruntung. Di Provinsi Khuzestan ini semenjak kolonial Inggris menemukan minyak di wilayah tersebut, menyumbang ± 90% total produksi minyak nasional Iran dari pendapatan perkapita nasional (Ahvaz Human Rights Organization, 2007:6). Sementara itu, minyak dan gas Khuzestan merupakan tulang punggung ekonomi Iran, orang-orangnya dipandang paling buruk, merupakan ancaman oleh pemerintah Iran karena tindakan pemberontakan mereka.

Pendapatan minyak dan gas dari provinsi ini sebagian besar dihabiskan di tempat lain, sejauh pemerintah Iran secara konsisten menolak untuk mengalokasikan hanya 1,5% dari pendapatan minyak ke Khuzestan seperti yang diminta oleh perwakilan provinsi di *Majlis* (parlemen) (Khazaal, 2008:12). Selain dikaruniai ladang minyak, Khuzestan berada di Teluk Persia yang merupakan jalur perdagangan internasional menghubungkan kawasan Asia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Khuzestan

a. Geografis

Ahvaz adalah sebuah ibukota yang berada di provinsi Khuzestan di Iran dengan luas 370.000 km². Zagros adalah rangkaian gunung yang bertindak sebagai penghalang alami untuk memisahkan Arabistan dari Iran dan terletak di provinsi barat daya yang saat ini dikenal sebagai Khuzestan Iran (lihat gambar 1) (Khazaal, 2008:11). Ini adalah rumah bagi orang-orang Ahvaz yang membentuk lebih dari 70% populasi Arab dari apa yang sekarang disebut Provinsi Khuzestan, dan mereka terus-menerus mengalami penganiayaan di bawah rezim Iran. Ahvaz yang beretnis Arab merupakan mayoritas populasi demografi di Khuzestan yang beragama Islam Sunni dengan total penduduk sebesar 2,4 juta (3% dari 80 juta total penduduk nasional Iran) (World Population Review, 2017).

Barat Daya (Timur Tengah) dengan kawasan Asia Selatan.

Provinsi Khuzestan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua wilayah, perbukitan dan daerah pegunungan di utara *Ahvaz Ridge*, dan dataran serta lahan rawa disebelah selatannya. Daerah ini diirigasi oleh sungai Karoun, Karkheh, Jarahi, dan Maroun. Bagian utara terdapat minoritas non-Persia (Bakhtiari-Azeri), sementara bagian selatan selalu memiliki kelompok minoritas yang beragam. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Ilam, Chahar-mahal dan Bakhtiari, Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad, serta Bushehr. Selain itu juga berbatasan dengan Irak dan Teluk Persia. Saat ini, Khuzestan masih mempertahankan kelompoknya yang beranekaragam, yang terdiri dari orang-orang Arab (Arab), Persia, Bakhtiari dan etnis Qashqais, dan Lors (CIA, 1980:1).

Khuzestan memiliki potensi besar untuk ekspansi pertanian, yang hampir tak tertandingi oleh provinsi-provinsi lain di negara itu. Sungai besar dan permanen mengalir ke seluruh wilayah yang berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Karun, sungai paling effluen bagi Iran, sepanjang 850 kilometer, mengalir ke Teluk Persia melalui provinsi ini (CIA, 1980:1). Potensi pertanian sebagian besar sungai ini, bagaimanapun, dan terutama di bagian bawahnya, terhambat oleh air yang membawa garam, yang jumlahnya meningkat seiring arus sungai menjauh dari sumber pegunungan dan perbukitan (Karandish, 2011:47). Sungai ini digunakan sebagai perikanan oleh rakyat Ahvaz.

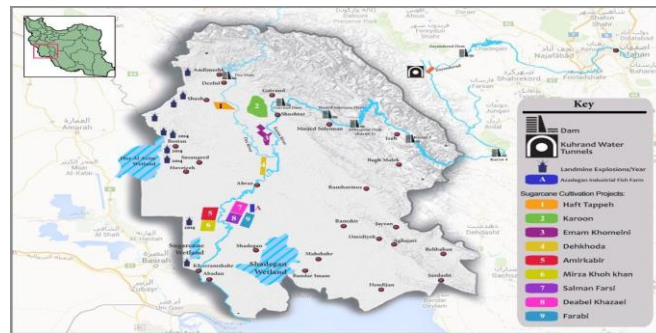
Iklim Khuzestan umumnya sangat panas dan terkadang lembab, terutama di selatan, sementara musim dingin jauh lebih dingin dan kering. Suhu musim panas secara rutin melebihi 45°C dan di musim dingin bisa turun di bawah titik beku, dengan hujan salju sesekali, sampai ke selatan ke Ahvaz.

Khuzestan mungkin ada-lah salah satu tempat terpanas di bumi dengan suhu maksimum di musim panas yang melonjak hingga 55°C dengan suhu mendekati 60°C (Ahvaz Human Rights Organization, 2007:6-7). Khuzestan mempunyai bentang alam padang pasir, sehingga mengalami banyak badai pasir (*sandstorms*).

b. Politik

Khuzestan beragam secara etnik menjadi rumah bagi banyak kelompok etnis yang berbeda. Hal ini berpengaruh pada politik pemilihan Khuzestan, dengan hak minoritas etnis memainkan peran penting dalam budaya politik provinsi tersebut. Apalagi pemerintah Iran melihat politik Khuzestan sangat mempengaruhi politik dan keamanan nasional. Lokasi geografis provinsi yang berbatasan dengan Irak, Kuwait, Qatar, dan Bahrain serta sumber dayanya juga menjadikannya kawasan yang sensitif secara politis rentan intervensi asing.

Etnis Arab di Khuzestan mengeluhkan distribusi pendapatan yang dihasilkannya oleh sumber daya minyak dengan klaim bahwa pemerintah pusat gagal dalam penciptaan lapangan kerja, proyek rekonstruksi pasca perang dan kesejahteraan dari menginvestasikan keuntungan dari migas. Indikator pembangunan manusia yang rendah di masyarakat Ahvaz berbeda dengan masyarakat Persia di Khuzestan (Duheume, 2017a). Hak minoritas sering diidentifikasi dengan masalah strategis, yakni sebagai kerusuhan etnis yang dirasakan pemerintah Iran dihasilkan intervensi pemerintah asing untuk melemahkan industri minyak negara dan stabilitas dalam negeri. Politik Khuzestan memiliki kepentingan internasional dan melampaui wilayah politik elektoral dalam negeri.



Gambar 1. Letak Geografis Provinsi Khuzestan yang berpenduduk Arab (Sumber: Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC),2014:56).

Maksudnya apabila Khuzestan jatuh kepusaran konflik maka akan meng-ganggu kepentingan politik internasional dalam hal stabilitas kawasan dan energi, walaupun dalam politik elektoral mereka antipati dan membentuk partai sendiri. Untuk membendung pergerakan politik moderat-radikalis rakyat Ahvaz, pemerintah Iran melakukan pembagian proporsi politik berdasarkan geohistoris etnis (lihat gambar 2). Pembagian politik tersebut berdasarkan geohistoris etnis, dikarenakan Iran pada masa Persia berdatangan suku bangsa dari Arab, Baluchi, Kurdi, Azeri, dan lain-lain untuk bermukim di Iran. Pembagian politik tersebut memengaruhi peta politik elektoral pemilih dalam me-mobilisasi suara kepada kandidat calon maupun meraih simpati dari pemilih oleh kandidat calon.

Munculnya gerakan reformasi pas-ca Reza Pahlevi (Revolusi Islam Syiah) menawarkan etnolinguistik pinggiran dan etnoreligius minoritas menjanjikan oto-nomi daerah yang lebih besar dan hak yang lebih adil. Tuntutan semacam itu sebagai kebebasan berekspresi. Setiap pemilu diadakan, para kandidat calon presiden menyuguhkan janji-janji manis untuk memikat etnis minoritas memi-lihnya dan berkoalisi dengan etnis Persia menghadapi kandidat dari lain (Curtis & Hooglund,2008:229).

Namun, janji manis untuk menghormati hak-hak dan kewajiban rakyat Ahvaz tak kunjung datang. Karena rayat Ahvaz dianaktirikan oleh para pmimpin Iran secara terus-menerus, maka mereka mem-bentuk *Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz* (ASMLA) di bawah Habib Jabr al-Ka'bi tahun 1999 dan berbagai organisasi perjuangan seperti *Ahvaz Democratic Popular Front* (ADPF) dan *Democratic Solidarity Party of Al-Ahvaz* (DSPA). Pemerintahan Islam Iran gagal mengubah apapun dari era Shah Pahlevi, ketika minoritas digeser sampai batas maksimum dan fasisme Persia pada puncaknya juga telah memulai pengorganisasian massa dari keragaman etnis yang terpisah dalam dekade terakhir 90-an.

Organisasi tersebut menjadi wa-dah militan rakyat Ahvaz menuntut pemberhentian segala diskriminasi so-sial terhadap mereka dan etnis minoritas Iran lainnya. Etnis Arab di provinsi ini tidak mau berkoalisi dengan etnis Persia, sebab secara kultural dan linguistik rakyat Ahvaz adalah keturunan Arab yang beragama Islam Sunni. Aktivis Arab di Khorram-shahr memprotes kurangnya kemajuan dalam hak-hak Arab (FILDH & LDDHI, 2003:55).



Gambar 2. Wilayah Pembagian Iran berdasarkan goetnisitas
(Sumber: <http://www.kavehfarrokh.com/wp-content/uploads/2010/11/Bernard-Lewis-Plan-2011.jpg>).

Pemerintah pusat telah mengelu-arkan surat edaran melarang berbahasa Arab untuk mata pelajaran akademis yang kebanyakan murid dan gurunya orang Arab. Meskipun tidak mungkin memperoleh surat edaran atau keputusan berkaitan dengan larangan penggunaan bahasa Arab di masyarakat dan tempat umum, banyak laporan menunjukkan bahwa pem-batasan dan larangan tersebut diberlaku-kan secara luas dan tidak resmi (Justice for Iran,2013:6). Pemerintah Iran di ba-wah sistem *Mullah* Syiah membatasi etnis Arab dengan melebur ke dalam budaya Persia bertujuan agar tidak berkembang-nya paham Pan-Arabisme dan radikalis-me yang berupaya menjatuhkan pemerintah.

c. Sosial dan Budaya

Iran adalah negara yang beragam secara etnik dan religius, namun keraga-mannya telah ditumbangkan berulang kali oleh negara sebagai sarana untuk menyajikan dan mempertahankan persatuan nasi-onal. Pemimpin Iran, baik selama dinasti Pahlavi dan kemudian revolusi Islam, telah lama khawatir bahwa kaum minoritas, yang sebagian besar berada di pinggiran provinsi, menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan nasional dan integritas teri-torial. Upaya

terdahulu untuk menegaskan kembali identitas etnolinguistik melalui pakaian atau bahasa lokal telah ditentang sebagai upaya eksplisit untuk melemahkan negara. Meskipun kelompok-kelompok ini termasuk, antara lain, orang Arab, Kurdi, Baluchis, Turkmen, Azeri, dan Lurs terdiri dari kira-kira setengah dari populasi Iran, kebutuhan lokal mereka telah diabaikan oleh pemerintah menimbulkan keluhan politik, sosiokultural, dan ekonomi.

Lebih dari setengah Ahvaz, terma-suk hampir semua orang Persia tinggal di daerah perkotaan, lebih dari 40% di empat kota besar di Provinsi Khuzestan pada tahun 1980: Ahvaz (329.000), Abadan (297.000), Khorramshahr (147.000), dan Dezful (110.000) (CIA,1980:2). Peme-rintah mengumumkan pada tahun 2005 bahwa pihaknya akan membangun reaktor nuklir di Khuzestan yang akan menjadi Reaktor Energi Ringan PWM berka-pasitas 360 MW (Khazaa,2008:20). Khu-zestan juga merupakan rumah bagi salah satu dari enam zona perdagangan bebas di Iran yang disebut *the Arvand Free Trade Zone* (Ahvaz Human Rights Organization ,2007:12). Zona perdagangan ini menjadi batu sandungan perdagangan internasional Iran dengan negara-negara Teluk dan Asia Selatan

dalam menciptakan stabilitas Teluk Persia (*Persia Strait*).

Tingkat pengangguran resmi untuk Iran terletak sekitar 12%, namun, di Khuzestan tingkat pengangguran melayang hampir 20% (Khazaal, 2008:20). Sementara itu secara ekonomi rakyat Ahvaz masih mengandalkan pendapatan dari minyak dan gas yang dibangun Sovyet selama ta-hun 1960-1970an, agrikultural, dan peter-nakan (CIA, 1980:4 & 5). Mayoritas pria dewasa Arab perkotaan adalah pekerja ti-dak terampil (*unskilled workers*), teruta-ma di industri minyak dan gas. Orang-orang Arab juga bekerja dalam perdaga-ngan dan layanan, dan sekelompok kecil profesional Arab telah muncul sejak tahun 1980an (Curtis & Hooglund, 2008: 100).

Banyak orang Arab yang tinggal di sepanjang pantai Teluk Persia meperoleh pendapatan keluarga dari penangkapan ikan atau dari operasi *dhow* (kapal kecil) yang terlibat dalam perdagangan antara Iran dan negara-negara Arab Teluk di Teluk Persia (Shahibzadeh, 2015:120). Rakyat Ahvaz (Ahwazi) memiliki budaya Arab sama seperti di negara-negara Teluk yaitu memakai baju gamis dan *keffiyeh* (laki-laki), memakai cadar dan pakaian hitam untuk perempuan, menggunakan bahasa Arab dan makan dengan makanan khas Arab. Budaya Arab yang mendarah daging pada rakyat Ahvaz inilah mereka memperjuangkan kebebasan dan keseta-raan dari perlakuan diskriminasi sosial oleh pemerintah Iran (Shahibzadeh, 2015: 121). Di Khuzestan sendiri, rakyat Ahvaz tidak hanya berbahasa Arab melainkan berbahasa Persia dengan dialek Bakhtiari, Elam, dan Qashqai (Karandish, 2011:59). Rakyat Ahvaz telah beramal gamasi de-ngan berbagai etnis selama ratusan tahun.

Latar Belakang Perlawanan Rakyat Ahvaz terhadap Pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan

Tahun 1857-1910, Inggris dan Nashiruddin Syah Al-Qajari menghormati

kedaulatan rakyat Ahvaz di Khu-zestan sesuai perjanjian Ardrum II dengan catatan Inggris-Iran boleh membangun perekonomian disana (Khazaal, 2008:12). Pada masa Qajar dibangunlah kilang minyak oleh *Anglo - Iranian Oil Company* (AIOC) tahun 1910 untuk keperluan politik dan perang Inggris di Asia Barat Daya (Karandish, 2011:70). Modernisasi Iran yang berlangsung masa Qajar memberi konsekuensi berat akan kehadiran bangsa Inggris yang memenuhi kebutuhan finansial pembangunan dalam negeri.

Inggris dan Qajar menunjuk pangeran kerajaan menjadi gubernur provinsi pada abad ke-19, guna meningkatkan keku-asaan mereka berhubungan dengan kepala suku di Khuzestan, Sheikh Kha'zal. Terjadi kerjasama antara pemerintah Qajar dan rakyat Ahvaz untuk membangun sa-rana dan prasarana pembangunan di Khu-zestan. Pembangunan infrastruktur se-perti jalan, rumah sakit, sekolah, dan pela-buhan bandar An-Nashiriyah dan Abadan menjadikan Khuzestan sebagai jalur per-dagangan internasional Asia Barat Daya (Al-Rahwi, dkk, 2015:55).

Pembangunan tersebut guna menghadapi serangan pasukan Jerman yang berkoalisi dengan pasukan Turki. Tidak hanya Inggris yang hadir di Iran dalam proses modernisasi, namun kehadiran Ru-sia di Iran tahun 1872 sebagai *na-tion shopkeeper* mendirikan Kantor Giro dan Bank Pinjaman (KGBP) Rusia meng-usahakan pembangunan jalur kerea api dari Transkaukasia ke utara Iran (Lenc-zowski, 1993:23). Justru Inggris memicu ketegangan antara pemerintah dan suku setempat, yang sering bertindak sebagai *proxy* pemerintah Inggris (Ashgarzadeh, 2007:85).

Keamanan Inggris atas rute perdagangan dan menjaga pipa instalasi dan kilang minyak memfasilitasi kegiatan komersial dan industri Inggris di wilayah tersebut, sehingga ada hubungan patron-klien dengan suku

setempat. Tidak hanya bersifat geopolitik, namun juga koalisi Iran-Inggris bersifat politik-ideologi yaitu membendung gerakan Pan-Turkiisme yang berkembang di Semenanjung Arab tahun 1925-1930-an ke Iran (Lenczowski, 1993:41). Gerakan ini menyuarakan per-satuan orang Arab (*Arabian union*) untuk melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di tanah Arab.

Pengaruh paham Pan-Turkiisme tersebut mempengaruhi rakyat Ahvaz untuk memberontak. Mereka berontak, karena Inggris memberikan bantuan finansial yang besar kepada pemerintah pusat tahun 1919 untuk mendukung integrasi nasional dan menekan kemerdekaan pada etnis minoritas (Ashgarzadeh, 2007:86). Bantuan finansial dari Inggris, mendukung kesepakatan Perjanjian Anglo-Persia tahun 1919 secara luas dipandang sebagai pembentukan protektorat Inggris atas Iran (Curtis & Hooglund, 2008:27).

Terjadi kudeta militer tahun 1920 oleh Shah Reza Khan yang didukung Inggris guna melindungi kepentingan migas di Khuzestan, sehingga mengakhiri Dinasti Qajar. Pada akhirnya, pemerintah Inggris ikut campur mengenai independen Arabistan dan tidak mendukung Sheikh Kha'zal (Ashgarzadeh, 2007:86 & Karandish, 2011:433). Tujuan Inggris (*British*) mendukung Reza Khan adalah agar pergerakan komunis Soviet tidak memperoleh pengikut di Iran terutama kalangan etnis minoritas.

Reza Khan, memberi jalan pada kekuatan sentral yang menuntut identitas Persia. Sikap otonom ini menyingkirkan identitas multinasional dan multietnis yang tinggal di Iran (FIELDH & LDDHI, 2003:11). Persia menganggap diri mereka sebagai keturunan Arya murni, dengan orang Arab Semit dianggap sebagai anggota ras yang inferior. Pada tahun 1925-1940, Reza Khan melakukan restrukturisasi dan penggabungan kesukuan yang dulunya berdaulat ke dalam integrasi nasional (Tamara, 2017:26).

Namun, restrukturisasi semacam itu bukanlah hal baru bagi orang Iran. Meraka pertama kali menguji "program bergaya Hitler" ini di Khuzestan, dengan menggunakan metode yang berlanjut sampai 2017. Sejak 1925, Ahvaz telah sangat menderita di tangan penyerbu Persia, *Iranian Revolutionary Guard Corps* (IRGC) dan milisi Basij yang ganas (Hamid, 2015). Pemerintah Iran telah membuat penduduk Arab dan Sunni ketakutan oleh teror. Banyak pemimpin di Iran secara bergantian menyebut Ahwazi (Ahvaz) Arab sebagai "kelompok berbahasa Arab" (Shahibzadeh, 2015:119).

Dengan *Mullah* bertekad untuk mengubah Iran menjadi negara Syi'ah, sama seperti sekarang sedang diuji di Suriah, setiap kelompok minoritas berada di bawah ancaman rezim Bashar Al-Assad, terutama jika mereka menentang undang-undang tirani, atau menolak masuk Islam (Duheume, 2017b). Tidak ada orang di Ahvaz yang berani berbicara menentang kebijakan rasis negara, mendapati diri mereka segera dibungkam. Pasukan keamanan Iran selalu sangat brutal setiap kali mereka menyerang melawan Ahvaz, dan menembaki kerumunan demonstran untuk membubarkan mereka.

Ahvaz, Susangerd, Hoveyze, Shadegan (Doorak), Omidyeh, dan Khorramshahr adalah kota utama dengan orang-orang yang berbicara bahasa Arab, namun memiliki nasionalisme Arab yang cukup besar (Curtis & Hooglund, 2008: 100). Meskipun kebutuhan identitas yang jelas untuk ditangani terus berlanjut dalam aliran kekayaan ekonomi, mendorong isu tersebut menyediakan mekanisme perlawanan atas diskriminasi sosial dalam bentuk apapun. Saat Muhammad Reza Pahlavi berkuasa dari tahun 1941-1978, pemerintah menekan perlawanan terhadap setiap gerakan oposisi politik yang dikawatirkan mengancam kekuasaannya (Isawati, 2013:19).

Untuk meredam pemberontakan, Reza Pahlavi mengintruksikan Savak untuk

mengintimidasi kelompok yang membangkang (Tamara, 2017:41). Tindakan itu mencabut otonomi rakyat Ahvaz yang memiliki identitas berbeda dari mayoritas rakyat Iran yang beretnis Persia. Selain itu, dilakukan Persianisasi telah melibatkan penyitaan tanah Arab dan pemindahan paksa.

Setelah mengalami tindakan ke-ras, sejumlah Ahvazis yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dari tanah mereka dan pindah ke daerah lain. Di sisi lain, banyak orang non-Persia juga di paksa masuk agama Syiah untuk memungkinkan mereka mencari pekerjaan dan memberi makan keluarga mereka, karena pemerintah Iran mendiskriminasi kaum Sunni atau kelompok etnis minoritas lainnya di pasar kerja (Duheume, 2017a). Pengalaman modern komunitas etnis Arab, yang tinggal di sudut barat daya Iran, terutama di provinsi kaya minyak Khuzestan, ditandai oleh kesulitan modernisasi yang parah, termasuk marginalisasi sosiopolitik, kurangnya kesempatan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Kemudian, pada tahun 1979 terjadi Revolusi Iran, dimana revolusi ini timbul akibat ketidakpuasan rakyat Iran kepada Reza Pahlevi atas krisis ekonomi yang menimpa Iran tahun 1970an (Isawati, 2013:24)

Revolusi ini membangkitkan fundamentalis Islam dengan memproklamkan revolusioner Syiah (Zayar, 2002:94). Kondisi tersebut memicu kekecewaan atas kebijakan Persianisasi dan perilaku korup pejabat yang menyengsarakan rakyat. Pro-gram Persianisasi menyebabkan rakyat Ahvaz tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Namun nyatanya, semenjak terbentuk rezim Islam Syiah (1979-2017), diskriminasi kepada rakyat Ahvaz masih berlanjut. Sejak aneksasi awal Ahvaz oleh Iran, situasi kemanusiaan orang-orang Ahvaz Arab terus berkembang, dengan tingkat penindasan oleh rezim meningkat setiap hari, berlanjut ke kebijakan seperti penggunaan nama Persia (Al-Rawi,dkk, 2015:59). Pemerintah

mengadakan ren-cana uji teritorial sebagai upaya merubah perubahan komposisi populasi Arab (baik penduduk maupun pekerja non-penduduk) di Khuzestan dengan penempatan orang-orang etnis berbahasa Persia dengan menyediakan lapangan kerja di daerah industri dan pertanian di Khuzestan (*Letter of Intention to Change Ethnic Com-position of Arabistan (Ahvaz) from Iran's Armed Forces (IAF)*).

Kebijakan diskriminasi juga terjadi di bidang militer terutama usaha pembatasan untuk menjadi calon tentara. Kebanyakan tentara diisi oleh etnis Persia dan etnis minoritas yang mau berkoalisi dengan pemerintah (Duheume, 2017b). Diskriminasi sosial mengakibatkan perubahan Ahvaz menjadi kelas sosial kelas dua. Tujuannya adalah pengurangan sepertiga dari total populasi Arab di Khuzestan (*Sayed Mohammad Ali Abthahi Letter*).

Banyak desa disana tanpa sekolah dan mereka yang beruntung cukup bersekolah dididik di Provinsi Farsi. Sekitar 80% wanita Arab buta huruf dibandingkan dengan 50% pria. Lebih dari 30% orang di bawah 30 tahun menganggur di kawasan industri yang sangat padat, terutama karena orang Persia mendapat prioritas (Al-Habtoor,2015). Daerah mayoritas Arab di Khuzestan memiliki akses yang sangat terbatas layanan pemerintah, termasuk penyediaan kesehatan dan pendidikan dasar yang layak.

Penduduk kota-kota besar seperti Khorramshahr dan Abadan telah menderita akibat pemadaman listrik yang sering, dan distribusi gas yang terfragmentasi antar-penduduk (Duheume, 2017a). Ribuan orang tidak memiliki akses terhadap air minum bersih, karena sungai telah dialihkan ke Provinsi Farsi yang kering dan masih banyak yang kekurangan listrik dan gas (Justice for Iran, 2013:18). Sebagian akibat dari kurangnya investasi dalam layanan dan infrastruktur regional, tingkat pengangguran dan kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional di Khuzestan (Duheume, 2017a).

Meskipun integrasi antara masyarakat Arab dan Persia semakin meningkat di kota-kota besar di provinsi ini, desa-desa terpencil sebagian besar dipisahkan berdasarkan bahasa dan etnisitas. Permukiman non-Arab memisahkan daerah Arab dengan dinding pemisah. Ketidakadilan dan penganiayaan terhadap wacana agama sebagai akibat memperkuat identitas Syiah (Zweiri & Zahid, 2007:9). Jadi, melihat situasi Ahvaz secara keseluruhan, "re-strukturisasi etnis" yang dilakukan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk agama, namun juga ras dan identitas kesukuan mereka (Shahibzadeh, 2015:125). Kebijakan teokrasi sosial yang selama 1979-2017 dibentuk membantu etnis minoritas Arab menghasilkan perlawanan kepada pemerintah.

Gerilya di Ladang Minyak sebagai Perlawanan Rakyat Ahvaz terhadap Diskriminasi Sosial Pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan

Ketahanan kesukuan terhadap pasukan pemerintah pecah satu demi satu di Khuzestan. Setelah hampir lima belas bulan akhirnya, detasemen 300 orang tiba di Khuzestan pada bulan Oktober 1923 dan ditempatkan di Dezful dan Shushtar (Karandish, 2011:394). Penguatan Pemerintah Reza Khan membuat Kha'zal mengamatinya dengan waspada.

Pada akhirnya Sheikh Kha'zal dan rakyat Ahvaz mulai mengadakan gerilya di ladang minyak tahun 1925. Strategi militer dan perang tersebut dipertimbangkannya atas dasar keadaan geografis Khuzestan yang bergurun pasir, apalagi etnis Arab sudah terbiasa dengan gurun pasir. Dengan gerilya di ladang minyak yang bergurun dapat mematahkan dan mempersulit serangan dari pemerintah Iran yang diwakili IAF (*Iran Armed Force*).

Strategi gerilya ditentukan oleh kelemahan pemberontak dalam kaitannya dengan kekuatan militer superior yang mereka hadapi. Karena kelemahan menghalangi percobaan langsung kekuatan dalam pertempuran terbuka, gerilyawan tentu

bertujuan untuk menolak kemenangan militer terhadap strategi penyangkalan gerilya mereka yang tidak bertujuan mengendalikan wilayah (Kalyanaraman, 2003:173). Maksudnya gerilya rakyat Ahvaz (Ahwazi) semata-mata bukan menguasai seluruh provinsi dari pendudukan militer Iran, namun bagaimana gerilya ini menjadi tolak ukur menghadapi pasukan Iran ke depannya.

Sebagai gantinya, operasi *hit-and-run* dan penyerangan dilakukan untuk melonggarkan kontrol negara atas wilayah dan populasi Arab (Al-Habtoor, 2015). Akibatnya, kebutuhan persenjataan gerilya terbatas pada senjata ringan. Perang gerilya relatif murah untuk upah, meski agak mahal untuk diimbangi. Mereka melakukan pembunuhan kepada orang Persia yang menjaga sarana dan prasarana yang berada di kilang minyak dalam operasi *hit and run* serta penyerangan tentara Iran di berbagai tempat.

Gerilya bertujuan untuk mengurangi tentara musuh, persediaan, infrastruktur, ketenangan pikiran, dan yang terpenting, waktu. Dengan kata lain, perang gerilya dirancang untuk menghancurkan dari musuh (Kalyanaraman, 2003:173). Tindakan sabotase kilang dan pipa migas mengganggu distribusi minyak dan gas di Khuzestan, sehingga cukup besar menurunkan pendapatan energi Iran (CIA, 1980:iii).

Aksi gerilya tersebut berlanjut dari tahun 1949-1964, diadakan serangan ke Abadan, Huwaizah di bawah komando Sheikh Yunus Al-Ashi dan Sheikh Rasyid Kha'zal Al-Ka'bi. Namun, pemerintah Iran mengerahkan pasukan militer IAF kepada rakyat sipil di Al-Muhayyarizi sebagai bentuk balasan kepada gerilyawan pembangkang (Abud, 2014:44). Untuk mencapai tujuan pembebasan dari diskriminasi sosial pemerintah Iran, mereka juga membentuk organisasi sosial-politik.

Organisasi yang mereka bentuk adalah *Democratic Solidarity Party of Al-Ahvaz, Al-Ahwaz Arab Popular Democratic Front*

(AAPDF), dan *Arab People's Democratic Front* (APDF). Ketiga organisasi ini mengusung *self-determination* dan dimotivasi oleh tujuan keagamaan, namun berada dalam ideologi nasionalisme sekuler Arab.

Ketika terjadi Revolusi Islam di Iran, aksi gerilya masih terus berlanjut. Kehadiran fundamentalisme Islam revolusioner yang memperjuangkan Revolusi Islam menggambarkan propaganda tahunan intelektual mengembalikan relasi kapitalis, politik, dan negara (Zayar, 2002: 94). Ayatollah Ruhollah Khomeini dan pemimpin penerusnya memainkan Persianisasi untuk menjepit pergerakan moderat-radikal Ahvaz dan etnis minoritas lainnya (Al-Rawi, dkk, 2015:59). Sepanjang 1979-2017, banyak aktivis moderat radikal Ahvaz yang ditangkap IRGC ke penjara Gohar Dasht di kota Kara dan terjadi pula *ethnic cleansing* (DSPA, 2014 & DSPA, 2013).

Namun, rakyat Ahvaz menuntut lebih banyak otonomi dan penguasaan diri terhadap populasi Arabis di Iran. Mereka tidak berusaha memisahkan diri dari Iran atau terlibat dalam konfrontasi kekerasan (Ashgarzadeh, 2007:21). Rakyat Ahvaz mengadakan gerilya menggelorakan rasa cinta tanah air menyediakan makna hubungan teritorial dalam mewujudkan tanah bagi bangsanya mempengaruhi perilaku mereka untuk mengadakan perlawanan (Grosby, 2011:56 & 65).

Perlawanan mereka menggunakan strategi gerilya di kilang-kilang minyak yang berada di Khuzestan. Kilang-kilang tersebut di bakar ataupun diblokade bahkan dikuasai oleh para pemberontak (lihat gambar 3). Penguasaan kilang-kilang tersebut diharapkan mampu mempengaruhi pemerintah mempertahankan sumber ekonomi terpenting Iran di Khuzestan. Pada bulan April 1979, kelompok Arab di Khuzestan mengeluarkan Deklarasi Muham-merah 1979 yang berisi tuntutan menghormati hak masyarakat Arab dan hak mereka atas pemerintahan sendiri,

dalam kerangka Republik Islam, dan mempertahankan kesatuan wilayah Iran (*Al-Moham-merah Declaration April 1979 in Khu-zestan Province*). Namun deklarasi ini digubris pemerintah dengan mengerahkan tentara untuk membasmi pemberontak, terjadilah *Black Wednesday 29 May 1979* (Iran Human Rights Documentation Center, 2014:8).

Kemudian pada bulan September dan Oktober 2005, serangkaian serangan bersenjata dilakukan terhadap instalasi minyak di Ahvaz, dua bom juga meledak di kota Ahvaz, namun demikian kekuatan bom-bom ini, tidak mungkin diproduksi oleh penduduk setempat di ruang belakang sebuah perkampungan kumuh. Bom-bom itu diproduksi secara profesional. Mereka dibangun dengan bahan peledak plastik kelas tinggi, dan serangan tersebut memiliki semua keunggulan dari kekuatan proksi pemberontak (Duheume, 2017b).

Selain itu mereka juga melakukan perlawanan dengan mengebom stasiun pengisian BBM dan kilang minyak di Kayan Paris serta Ats-Tsaurah dan Al-Malashiyah (Abud, 2014:49). Hal itu menyebabkan Ahvaz dan sekitarnya diblokade oleh IAF akibat aksi penyerangan terhadap kilang-kilang migas milik pemerintah Iran di Khuzestan. Menurut rezim Iran, sekelompok gerilyawan *Martir Mo-hieldain* telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan, meskipun kelompok pemberontak ini telah dibubarkan tahun 1980an (Ashgarzadeh, 2007:127). Sejauh menyangkut bukti, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan adanya kelompok lokal yang melakukan serangan semacam itu, kecuali ada alasan motifnya.

Tapi motifnya bukan hanya menuntut keadilan kepada pemerintah. Gerilya ini menyuarakan rezim Syiah Iran melakukan program pembersihan etnis di daerah tersebut masa Mohammad Khatami (Iran Human Rights Documentation Center, 2014:11). Selain itu, gerilyawan sangat menyalahkan

kolonialisme Inggris yang mengintegrasikan Ahvaz ke wilayah Iran demi kepentingan politik-ekonomi Inggris. Gerilya menjadi wadah militer rakyat Ahvaz yang efektif ketika langkah politik lokal mereka dibungkam dengan cara pengerahan IAF maupun meneruskan program Persianisasi.



Gambar 3. Kilang Minyak yang dibakar pejuang Arab Ahvaz (Sumber: DSPA, 2013).

Pada tahun 2013, pemboman dilakukan di Ahvaz, yang dilaporkan dilakukan oleh Gerakan Perjuangan Arab untuk Pembebasan Ahwaz (*Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz-ASMLA*) (DSPA, 2013). Pemberontakan dan kerusuhan sporadis semakin meluas dari tahun 1990-2017. Pada tanggal 2 April 2015, 3 perwira Iran dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kota Hamidiyeh, sekitar 25 kilometer (15 mil) barat kota Ahvaz (Hamid, 2015). Pada awal Juni 2016, sebuah kelompok Sunni yang dikenal sebagai *Suqour al-Ahvaz* ("*Hawks of Ahvaz*") meledakkan kompleks Petrokimia Bou-Ali-Sina di Bandar-E Mahshahr, Khuzestan (Speyer, 2016).

Pada bulan Juli 2016, pada dua kesempatan, gerilyawan *Ahwazi Brigade Al-*

Farouq dari Perlawanan Nasional Ahvaz meledakkan jaringan pipa di distrik Johar as-Sabaa. Kabarnya, anggota *Brigade Al-Farouq* berhasil melarikan diri setelah operasi tersebut, meski ada upaya pasukan keamanan dan Garda Revolusi untuk melacak pelaku pemboman (Al Bawaba News, 2016).

Brigade Falahiyeh dari *Brigade Martir Mohieldain Al-Naser* telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pipa yang berjalan dari Falahiyeh (Shadegan) ke Mashour (Mahshahr) pada pagi hari tanggal 24 September 2013. Pipa tersebut memasok kompleks Petrokimia Marun, eksportir *polietilen* terkemuka ke negara-negara seperti Tiongkok dan India (DSPA, 2013). Operasi ini sejalan dengan tujuan kelompok untuk mengganggu fasilitas industri milik

pemerintah, yang dika-takan mewakili pendudukan dan pencu-rian sumber daya di tanah asli Arab.

Dua brigade tersebut merupakan sayap militer AMSLA yang memang me-lakukan gerilya di ladang minyak telah menargetkan jaringan pipa di masa lalu dalam upaya melumpuhkan pendapatan utama negara Iran. Awal bulan September 2013, sebuah ledakan besar di pabrik petrokimia di Abadan diklaim sebagai serangan militer oleh *Brigade Al-Areen* untuk Pembebasan Al-Ahvaz dalam kerja sama dengan *Brigade Al-Ababil* dari *Free Syria Army* (FSA) (DSPA, 2013).

Sejauh menyangkut keterlibatan rezim Iran, ada tuduhan dari kelompok separatis Ahvas, yang mengatakan bahwa pemboman ini dilakukan oleh agen IRGC. Rencananya pemboman ini untuk melucuti demonstrasi damai Ahvaz Arab, agar terlihat seolah-olah wilayah itu penuh dengan kelompok teroris, yang mencari pemberontakan dan jatuhnya rezim terse-but, melalui demonstrasi jalanan yang keras, dan aktivitas teroris, yang akan memberi para *Mullah* alasan untuk melak-ukan tindakan keras. Ini tentu saja meru-pakan keberartian mereka akan ruang kelompoknya yang secara historis telah diambil paksa oleh pemerintah Iran.

Dalam bentuk perlawanan melalui gerilya di ladang minyak merupakan interpretasi lebih jauh dimungkinkannya eksistensi teritorial sebagai tanah air me-reka yang sah (Grosby, 2011:72). Keter-kaitan teritorial dengan identitas budaya mereka sebagai tanah air berkembang secara sejarah untuk mendefinisikan sendiri konteks keruangan yang telah memelihara mereka selama ribuan tahun. Da-lam sejarah Iran pasca 1979, dibentuk pemerintah Iran bagaimana mengelola masyarakat multikultur dengan cara visi rezim chauvinistik didasarkan pada nasio-nalisme reaksioner, rasisme, monolingu-alisme, dan monokulturalisme masih ber-fungsi dalam masyarakat Iran (Ashgarzadeh,2007:97).

Di sisi lain pemerintah mengerahkan IAF untuk mengamankan geopolitik Iran pada Provinsi Khuzestan dari sporadis perlawanan rakyat Ahvaz disertai intervensi asing. Namun, rezim Islam yang baru tidak hanya menolak orang-orang Ahvaz Arab dan kelompok etnis lainnya mengenai hak-hak mereka yang sah, namun juga memulai kampanye pem-bunuhan, penyiksaan dan kekerasan terha-dap mereka. Pemerintah Iran melakukan kekerasan bersenjata menghadapi perla-wanan rakyat Ahvaz diperbolehkan dan tidak dicap sebagai kejahatan perang. Ambarwati,dkk (2013:65) menjelaskan kekerasan bersenjata diperbolehkan dalam rangka menjaga stabilitas kawasan dan integrasi nasional sebagai bagian dari hu-kum humaniter internasional.

Dalam konteks tekanan eksternal di Teluk Persia, kebijakan ini mencer-minkan penyesuaian kembali prioritas dari penanganan penyakit ekonomi funda-mental untuk merespons tekanan keama-nan yang terkait dengan kawasan Teluk Persia (Zweiri & Zahid, 2007:9). Tekanan yang dimaksud adalah upaya pemerintah Iran di bawah rezim Syiah menstabilkan Khuzestan yang berdekatan dengan negara-negara Teluk. Selain itu, juga mencegah keterlibatan milisi asing membantu pasukan pemberontak Ahvaz maupun kaburnya pasukan pemberontak ke negara yang dekat seperti Kuwait dan Irak. Kartu teroris ini kemudian digunakan oleh Iran melawan rakyat Ahvaz, sebagai pembe-naran kekerasan dari IAF terhadap etnis Arab.

KESIMPULAN

Sementara politik penindasan dan asimilasi telah berhasil membuat mesin rasis, namun belum dapat sepenuhnya menghapus tanda keragaman etnis di Iran. Pada awal abad 20-21, bangsa-bangsa tertindas dan terpinggirkan Iran semakin menyadari hak-hak dan status mereka yang tak dapat dicabut oleh negara. Sama pentingnya, mereka menyadari politik ra-sis yang berusaha untuk

memusnahkan se-jarah, dan identitas mereka. Tanda-tanda gerilya adalah bentuk ketidakpuasan, dan perjuangan antirasis di kalangan masyarakat Arab tertindas di Khuzestan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Dokumen Resmi (*Official Document*)

Al-Mohammerah Declaration April 1979 in Khuzestan Province.

Sayed Mohammed Ali Abthahi Letter 1998 M. Letter of Intention to Change Ethnic Composition of Arabistan (Ahvaz) from Iran's Armed Forces (IAF).

Central Intelligence Agency (CIA). 1980. *Iran's Khuzestan Province.* Washington, D.C., USA: Central Intelligence Agency (CIA), Kode: RDP81B00401R000-500070001., (*E-Document*), (Online) (<https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP81B00401R000500070001-2.pdf>), diakses tanggal 10 Oktober 2017.

B. Buku-buku (*Books*)

Abud, S.S. 2014. *Minoritas Etnis dan Agama di Iran.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ambarwati, D. R., & Rusman, R. 2013. *Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan Internasional.* Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada.

Ashgarzadeh, A. 2007. *Iran and the Challenge of Diversity: Islamic Fundamentalism, Aryanist Racism, and Democratic Struggles.* New York: Palgrave Macmillan.

Curtis, G. E. & Hooglund, E. 2008. *Iran: A Country Study.* Washing-ton,

D.C.: Federal Research Division Library of Congress (FRD-LC).

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Grosby, S. 2011. *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isawati. 2013. *Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia Barat): Dari Revolusi Libya sampai Revolusi Melati 2011.* Cetakan I. Yogyakarta: Ombak.

Karandish, A. 2011. *State and Tribes in Persia 1919-1925: A Case Study on Political Role of the Great Tribes in Southern Persia.* Berlin: Otto Suhr Institute for Political Science, Department of Political and Social Sciences University of Berlin.

Lenczowski, G. 1993. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Shahibzadeh, Y. 2015. *The Public Sphere and Politics of Identity in Khuzestan in Yadullah Shahib-zadeh. 2015. The Iranian Political Language: From the Late Nineteenth Century to the Present (p.119-138).* New York: Palgrave Macmillan.

Tamara, N. 2017. *Revolusi Iran.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gra-media (KPG).

Zayar. 2002. *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depannya.* Yogyakarta: Sum-bu.

C. Jurnal, Artikel, dan sejenisnya

Ahvaz Human Rights Organization. 2007. *Human Rights and the Ahwazi Arabs.* Report prepared by: British Ahwazi Friendship Society, Ah-waz Human Rights

- Organization, Ahwaz Education and Human Rights Foundation, Ahwaz Studies Center in July 2007.
- Al-Habtoor, K.A.. 2015. *Arab Ahwaz must be liberated from Iran*. Al-Arabiya English 29 March 2015, (*E-Article*), (Online), (<http://english.al-arabiya.net/en/views/news/middle-east/2015/03/29/Arab-Ahwaz-must-be-liberated-from-Iran.html>), diakses tanggal 17 September 2017.
- Al-Rahwi, A., dkk. 2015. *National Fabric: Iran's Ethnic Minorities*. (Editor: Bronwen Roberts). A Small Media Report United Kingdom (UK) under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International License, 15 September 2015, (*E-Report*), (Online), (smallmedia.org.uk), diakses tanggal 31 April 2017.
- Duheaupe, T. 2017a. *Analysis: 'Ethnic Restructuring' behind Iranian oppression of Ahwazi Arabs*, Al-Arabiya English 14 April 2017, (*E-Article*), (Online), (<http://English.alarabiya.net/en/features/2017/04/14/ANALYSIS-Ethnic-restructuring-behind-Iranian-oppression-of-Ahwazi-Arabs.html>), diakses tanggal 6 Juni 2017.
- Duheaupe, T. 2017b. *Is ethnic restructuring a tool at the hands of Iranian regime?*, Al-Arabiya English 17 March 2017, (*E-Article*), (Online), (<http://english.alarabiya.net/en/features/2017/03/17/Is-ethnic-restructuring-a-tool-at-the-hands-of-the-Iranian-regime-.html>), diakses tanggal 6 Juni 2017.
- Federation Internationale des Ligues des Droits l'Homme (FILDH) & Ligue de Défense des Droits de l'Homme en Iran (LDDHI). 2003. *Discrimination against Religious Minorities in Iran*. Report presented by the FILDH and LDDHI en Iran 63rd session of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, August 2003.
- Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC). 2014. *A Framework of Violence: Repression of the Arab Ethnic Minority in the Islamic Republic of Iran*. New Haven, Connecticut: Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC). (*E-Report*), (Online), (<http://www.alahwaz.info/en/wp-content/uploads/2014/10/A-Framework-of-Violence.pdf>), diakses 14 September 2017.
- Justice For Iran (JFI). 2013. *Seeking Rights to Cultural Identity: The Deathly Struggle of Ahwazi Arab Activists*. Iran: Justice For Iran, (*E-Report*), (www.justiceforiran.org), diakses tanggal 30 Mei 2017.
- Khazaal, F. 2008. *Arabistan (Ahwaz): Fact or Fiction?*. USA: The State of Arabistan National Association (SANA), (*E-Article*), (Online) (www.stateofarabistan.org), diakses tanggal 31 Mei 2017.
- Kalyanaraman, S. 2003. Conceptualisations on Guerrilla Warfare. *Strategic Analysis*, Vol. 27, No. 2, April-June 2003: p.172-185. New Delhi, India: The Institute for Defence Studies and Analyses.

- Speyer, L. 2016. *Mideast Analyst: Iran in Throes of Domestic Battle as Ethnic Groups Carry Out Attacks Against Regime Targets*. The Algemeiner Tuesday, January 30|14 Shevat 5778., (E-Article), (Online), (<https://www.algemeiner.com/2016/07/27/mideast-analyst-iran-in-throes-of-domestic-battle-as-ethnic-groups-carry-out-attacks-against-regime-targets/>), diakses tanggal 16 Oktober 2017.
- Zweiri, M. & Zahid, M. 2011. *Religion, Ethnicity and Identity Politics in The Persian Gulf*. Research Paper No. 111. Greece: Research Institute for European & American Studies, (E-Paper), (Online), (https://www.researchgate.net/publication/242690218_Religion_ethnicity_and_identity_politics_in_the_Persian_Gulf), diakses tanggal 27 September 2017.
- Hamid, R. 2015. *Al-Ahwaz: 90 years of Occupation and in Justice*, (Online), (<https://wewritewhatwe like.com/2015/04/08/al-ahwaz-90-years-of-occupation-and-injustice/>), diakses tanggal 23 Maret 2017.
- Ahwazi Arab Call for a General Strike*, (E-Article), (Online), (<http://www.alahwaz.info/en/?p=9584>), diakses 23 Agustus 2017.

D. Internet

- Al Bawaba News. 2016. *Ahwazi Arab Resistance Blow Up Iranian Pipe-line.*, (E-News), (Online) (<https://www.albawaba.com/news/ahwazi-arab-resistance-blow-iranian-pipeline-863908>), diakses tanggal 23 Oktober 2017.
- Democratic Solidarity Party of Al-Ahwaz (DSPA). 2013. *Another Gas Pipeline Struck by Ahwazi Militants*, (E-Article), (Online), (<http://www.alahwaz.info/en/?p=5097>), diakses tanggal 28 Agustus 2017.
- Democratic Solidarity Party of Al-Ahwaz (DSPA). 2014. *Political Prisoners in Iran Including an*